Perlindungan Hukum Terhadap Pernikahan Dibawah Tangan Dengan Wali Penghulu Berdasarkan Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia

(Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor: 0020/Pdt.P/2012/Pa.Smi.)

Ajang Nurjaman¹⁾

¹⁾ Universitas Islam Nusantara, Bandung
E-mail: ajangtedi@gmail.com

Abstract. Marriage for Indonesian people is a phenomenon that is different from various aspects of life. Marriage can be used. Marriage can also be seen from various realities. Keywords: socio-cultural aspects, marriage. In addition, there are also activities mentioned between goods and services. One of the legal requirements of a marriage according to Islam is the existence of a marriage guardian. By these matters the problems referred to are as follows: (1) How is the marriage guardian regulated according to Islamic law in Indonesia? and (2) what legal action can be taken by a husband and wife who request that their marriage be refused because of their marriage guardian? The objectives of this thesis research are: (1) to find out how the marriage guardian is determined according to Islamic law in Indonesia, and (2) to find out what legal actions can be taken by the husband and wife whose application for marriage is dropped because of his marriage guardian. The research methods used in this study are normative juridical research methods, using pragmatic truths where something is true if the truth can be proven. This research thesis uses primary legal material in the form of secondary data which is qualitative in nature which is a descriptive description of words and does not use numbers. The results of this thesis research are: (1) the guardian of marriage according to the religion of Islamic law basically consists of: (a) guardian of the court, (b) the guardian of the judge. And (c) muhakkam guardian. Whereas in the customary regulations in Indonesia, the marriage guardian consists of: (a) the guardian of the court, and (b) the guardian of the judge. Thus the guardian of muhakkam which is recognized for its existence in Islamic law, at the meeting there are no rules in the wedding invitation rules in Indonesia, and (2) legal actions that must be carried out by a married couple who are not recognized by their marriage are: (a) remarriage, (b) seek legal appeal, or (c) make an effort to review.

Keywords: Legal Protection, Marriage, Islamic Law

Abstrak. Perkawinan bagi masyarakat Indonesia adalah sebuah peristiwa yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan. Salah satu syarat sahnya sebuah perkawinan menurut agama Islam adalah dengan adanya wali perkawinan. Berdasarkan hal tersebut maka identifikasi masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut; (1) bagaimanakah pengaturan wali perkawinan menurut hukum Islam di Indonesia?, dan (2) bagaimanakah tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang permohonan *itsbat* nikahnya ditolak karena wali perkawinannya? Metode penelitian yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, menggunakan kebenaran pragmatis dimana sesuatu dianggap benar bila dapat dibuktikan kebenarannya. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa data sekunder yang bersifat kualitatif yang merupakan uraian kata-kata yang bersifat deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah; (1) wali pernikahan menurut agama hukum Islam pada pokoknya terdiri dari;

(a) wali *nasab*, (b) wali hakim, dan (c) wali *muhakkam*. Sedangkan di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, wali pernikahan terdiri dari; (a) wali *nasab*, dan (b) wali hakim saja. Dengan demikian wali *muhakkam* yang diakui eksistensinya di dalam hukum Islam, pada kenyataannya tidak ada pengaturannya di dalam peraturan perundang-undangan pernikahan di Indonesia, dan (2) tindakan hukum yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri yang tidak diakui pernikahannya tersebut diantaranya adalah; (a) melakukan pernikahan ulang, (b) mengupayakan upaya hukum kasasi, atau (c) melakukan upaya hukum peninjauan kembali.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pernikahan, Hukum Islam

I. PENDAHULUAN

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan; "..., maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,..."¹. Selanjutnya disebutkan bahwa; "Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,..."². Kemudian disebutkan juga bahwa; "..., hak beragama, ..., adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun"³. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dimana tidak dibenarkan dengan alasan apa pun warga negara (penduduk) Indonesia untuk tidak memeluk agama/kepercayaan apapun. Jadi tidak ada tempat bagi golongan atheis⁴ untuk hidup di wilayah Negara Republik Indonesia. Lebih lanjut disebutkan juga bahwa pada pokoknya warga negara (penduduk) Indonesia bebas untuk memeluk agama atau kepercayaan apapun dan beribadat menurut agama atau kepercayaannya tersebut karena hal tersebut menjadi bagian dari hak asasi warga negara Indonesia yang dilindungi oleh negara.

Penelitian ini terkait dengan Penetapan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor:

0020/Pdt.P/2012/PA.Smi. Pada pokoknya amar putusan penetapan agama tersebut menolak permohonan para pemohon untuk menetapkan sah pernikahan para termohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2009 dan dilangsungkan di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Tanjung Jumalai Kota Balikpapan. Penolakan pengadilan agama disebabkan karena wali nikahnya tidak sesuai sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, meskipun menurut syariah Islam wali pernikahan yang dimaksud (diduga) adalah sah (dapat dibenarkan).

Secara *das sollen*, seharusnya pernikahan tersebut dapat disahkan oleh pengadilan agama karena secara *de facto* (pada kenyataannya) pernikahan sudah dilakukan dan sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) tahun serta pasangan tersebut sudah dikaruniai keturunan (seorang anak). Secara *de jure* (menurut hukum) pernikahan tersebut sah karena dilakukan menurut ketentuan hukum Islam sebagaimana agama yang dianut oleh pasangan pengantin yang melangsungkan pernikahan tersebut. Tetapi pada kenyataannya (*das sein*), pengadilan menganggap pernikahan tersebut tidak sah karena dilakukan oleh wali penghulu yang tidak ada pengaturannya dan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian hukum yuridis normatif⁵. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan (*Preamble*), alinea keempat.

² Op.cit., Pasal 28E ayat (1).

³ Op.cit., Pasal 28I ayat (1).

⁴ "Orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan: kelompok -- tidak akan mengambil bagian dalam suatu upacara agama". Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, *Atheis*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ateis>, diunduh hari Rabu tanggal 16 Mei 2018.

⁵ Soerjono Soekanto dikutip dari Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 41. Lihat juga: Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi menyebutnya "pendekatan (penelitian)". Lihat Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Monograf Filsafat Ilmu, Metode Penelitian Hukum Dan*

mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai; “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”⁶. Penelitian hukum normatif ini melakukan penelaahan masalah doktrinal menggunakan teori Kebenaran Pragmatik. Penelitian hukum yuridis normatif menggunakan metode deduksi⁷ yang didefinisikan sebagai; “penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum atau penemuan yang khusus dari yang umum, membuktikan suatu kebenaran baru berasal dari kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan diketahui sebelumnya (berkesinambungan)”⁸. Pendekatan yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan di dalam penelitian terevisi ini diantaranya berasal dari hasil penelitian ilmiah terdahulu yang dimuat di dalam jurnal ilmiah, hasil seminar ilmiah, dan lain-lain. Sementara itu bahan hukum tersier dapat berasal dari kamus-kamus, baik kamus bahasa maupun kamus hukum berita di media massa, dan lain sebagainya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Para ulama masih berbeda pendapat terhadap hukum asal perkawinan. Jumhur ulama mempunyai pendapat bahwa hukum asal dari perkawinan adalah sunnah. Hal yang sebaliknya disampaikan oleh Golongan Zahiri yang mengatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah wajib. Pendapat yang lebih “*compromise*” disampaikan oleh para ulama Maliki Muta’akhirin yang pada pokoknya berpendapat bahwa hukum asal menikah adalah sunnah untuk sebagian orang, wajib untuk sebagian orang, dan mubah untuk sebagian orang lainnya. Hal tersebut semata-mata ditentukan oleh adanya kekhawatiran

terhadap masing-masing orang pada masing-masing golongan tersebut⁹. Sebagai contoh; (a) bagi orang-orang yang khawatir akan terjerumus kedalam dosa apabila tidak menikah, maka baginya wajib hukumnya untuk menikah, (b) bagi orang-orang yang sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan serta tidak halangan untuk menikah, maka baginya sunnah hukumnya untuk menikah, dan (c) bagi orang-orang yang apabila melangsungkan atau tidak melangsungkan pernikahan, maka tidak ada perbedaannya. Hukum asal menikah tersebut kemudian berubah seiring dengan keadaan dan atau alasan orang melangsungkan pernikahan. Dengan demikian hukum pernikahan dapat dikategorikan menurut kategorisasi hukum Islam (*al akhkam – al khamzah*).

Para ulama tidak bersepakat terkait dengan syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan atau perkawinan. Meskipun demikian pada ulama tersebut sepakat bahwa hal-hal tersebut mutlak harus ada dalam sebuah perkawinan, yaitu; (a) mempelai laki-laki, (b) mempelai perempuan, (c) wali dari pihak mempelai perempuan, dan (d) saksi akad perkawinan tersebut¹⁰.

“Wali merupakan ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Dalam perkawinan wali adalah orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya”¹¹.

Wali nikah dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria tertentu seperti:

1. Wali nikah berdasarkan kekuasaannya, wali nikah ini dapat dibagi dua menjadi¹²; (a) wali *mujbir*, (b) wali *ghairu mujbir*, dan (c) wali hakim.
2. Wali nikah berdasarkan izin (untuk menikah/menikahkan), wali nikah ini dapat

Menggunakan Teori/Konsep Di Bidang Ilmu Hukum, Bandung, 2013, hlm. 25.

⁶ Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 12.

⁷ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Monograf Filsafat Ilmu, Metode Penelitian Hukum Dan Menggunakan Teori/Konsep Di Bidang Ilmu Hukum*, Bandung, 2013, hlm. 2.

⁸ Wikipedia, *Metode Deduksi*, Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Metode_deduksi, diunduh hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018.

⁹ Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2017, hlm. 7.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 9.

¹¹ Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Op.cit.*, hlm. 13 – 14.

¹² Hasballah Thaib, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*, Universitas Al Azhar, Medan, 2010, hlm. 74.

dibagi dua menjadi¹³; (a) perwalian terbatas (hanya dalam akad nikah), (b) perwalian yang tidak terbatas dalam pernikahan saja, dan (c) perwalian Sunnah¹⁴.

3. Wali dekat dan wali jauh¹⁵.

4. Wali *Muhakkam*. Wali *muhakkam* adalah wali yang diangkat oleh mempelai karena suatu keadaan tertentu yang menyebabkan wali *nasab* dan wali hakim tidak dapat menjalankan “ugasnya”. Wali *nasab* tidak dapat menjalankan tugasnya diantaranya karena tidak memenuhi persyaratan atau menolak menjadi wali nikah. Sementara wali hakim dimungkinkan tidak dapat melaksanakan tugasnya karena hal-hal lainnya (kepentingan negara lainnya).

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak ada pengaturan yang terperinci terkait dengan masalah wali nikah. Meskipun demikian terdapat pengaturan yang menyebutkan bahwa wali nikah yang tidak sah dapat menjadi penyebab batalnya suatu perkawinan¹⁶.

Pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang ditujukan kepada Menteri Agama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut berdasarkan tidak dimaksudkan sebagai peraturan perundang-undangan atau pengganti peraturan perundang-undangan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan, tetapi KHI dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat pengaturannya di dalam KHI tersebut. Keberadaan KHI yang dimaksud adalah untuk dijadikan pedoman oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang

memerlukannya¹⁷. Sementara itu “legalitas” materi KHI tersebut diperoleh dari penerimaan alim ulama peserta loka karya yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 1988¹⁸. Secara khusus disebutkan di dalam Inpres tersebut bahwa Menteri Agama di instruksikan oleh Presiden untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud¹⁹.

Menurut ketentuan Pasal 14 KHI, disebutkan bahwa terdapat 5 (lima) rukun perkawinan, yaitu adanya; (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, dan (e) ijab serta kabul. Dalam hal ini wali nikah ditetapkan sebagai salah satu rukun perkawinan di Indonesia. Lebih jauh pengaturan wali nikah ini terdapat di dalam Pasal 19 – 23 KHI, yang pada pokoknya menentukan bahwa wali nikah tersebut terbagi kedalam 2 (dua) golongan, yaitu; (a) wali nasab, dan (b) wali hakim.

Pengaturan lebih lanjut terkait dengan wali nikah tersebut terdapat di dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 Tentang Wali Hakim. Meskipun demikian tetap saja wali nikah yang “diakui” oleh peraturan pemerintah tersebut hanya terdiri dari 2 (dua) golongan saja, sama seperti yang terdapat pengaturannya di dalam KHI, yaitu; (a) wali nasab, dan (b) wali hakim.

Adapun kasus posisi perkara nomor: 0020/Pdt.P/2012/PA.Smi. dapat diuraikan sebagai berikut: Pernikahan Para Pemohon dilakukan di wilayah hukum KUA Kecamatan Tanjung Jumlai Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 17 Nopember 2009, Sedangkan *itsbat* nikah dimohonkan di Pengadilan Agama Sukabumi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 30 Mei 2012 dengan Nomor: 0020/Pdt.P/2012/PA.Smi. Sementara itu penetapan dari Pengadilan Agama Sukabumi tanggal 11 Juli 2012.

Seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa perkara ini terkait dengan permohonan penetapan *itsbat* nikah yang disampaikan oleh Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II)

¹³ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Era Intermedia, Solo, 2010, hlm. 177.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 184.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan Cetakan Ketiga*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 75 - 76.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*, Pasal 26 ayat (1).

¹⁷ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang *Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Konsideran huruf b.

¹⁸ *Op.cit.*, Konsideran huruf a.

¹⁹ *Op.cit.*, Pertama.

kepada Pengadilan Agama Sukabumi dengan menggunakan alasan-alasan (dalil-dalil) sebagaimana dibawah ini.

1. “Bahwa tanggal 17 Nopember 2009 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan di wilayah hukum KUA Kecamatan Tanjung Jumlai Kota Balikpapan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali Penghulu bernama H.M. Yusuf sebagai Penghulu Tanjung Jumlai dengan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Yadi Heriadi dan Muh. Kustiwa dengan maskawin berupa emas sebesar 2,1 gram dibayar tunai dan ijab qabul dan pada saat pernikahan tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat, dan pernikahan tersebut tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Jumlai Kota Balikpapan;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I duda cerai (nikah dan cerai dibawah tangan), sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hingga saat ini baik dari tokoh agama maupun tokoh masyarakat tidak ada yang mempertanyakan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah sendiri di Jalan Kenanga No. 40 RT 01 RW 15 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi dan telah bergaul sebagaimana layaknya sebagai suami istri dan dikaruniai orang anak bernama Kevin Raffy Syah, lahir 17-2-2011;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam belum pernah bercerai sampai sekarang;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan tidak pernah mendapatkan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tanjung Jumlai Kota Balikpapan, dan Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah

dari Pengadilan Agama Sukabumi, sebagai persyaratan Pengurusan Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;”²⁰.

Adapun amar putusan penetapan yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (FIRMAN HADIANSYAH BIN YAYA SUNARYA) dengan Pemohon II (YUDISTIRA ASGAR BINTI JOSEP ASGAR) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2009 yang dilangsungkan di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Tanjung Jumlai Kota Balikpapan;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Adapun pertimbangan hukum majelis hakim yang memeriksa dan memutus atau menetapkan perkara tersebut adalah sebagai berikut.

1. “Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;
2. Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan (*Itsbat*) Nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 17 Nopember 2009 di wilayah KUA Kecamatan Tanjung Jumlai Kota Balikpapan, tetapi tidak dicatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sampai sekarang tidak mempunyai bukti pernikahannya;
3. Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan, bahwa pada saat pernikahan para Pemohon berstatus agama Islam, namun ayah kandung Pemohon II beragama Kristen oleh karenanya pernikahan tersebut dilakukan dengan bantuan seseorang yang bertindak sebagai wali bernama H.M. Yusuf.
4. Menimbang, bahwa H.M. Yusuf menurut keterangan para Pemohon adalah orang yang sering menyelesaikan perkawinan, bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Urusan

²⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penetapan Nomor:0020/Pdt.P/2012/PA.Smi.,

- Agama yang mewilayahinya dan bukan pula sebagai Kepala Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
5. Menimbang, bahwa untuk syahnya perkawinan, haruslah dipenuhi seluruh unsur/rukun perkawinan yang menurut Pasal 14 KHI, rukun perkawinan tersebut adalah Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, dua orang saksi serta Ijab dan Kabul;
 6. Menimbang, bahwa Para Pemohon saat dilangsungkan pernikahan beragama Islam serta tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang menyebabkan terlarangnya untuk menikah;
 7. Menimbang, bahwa syarat sebagai seorang wali dijelaskan pada Pasal 20 KHI, seorang wali selain harus balig juga disyaratkan harus seorang muslim, maka oleh karena orang tua Pemohon II bukanlah seorang muslim, hak perwaliannya beralih kepada wali hakim yakni Kepala Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon II;
 8. Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim Pasal 1 ayat (2) berbunyi: "Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecaatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali". Pasal 2 ayat (1) berbunyi: "Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau *mafqud*, atau berhalangan, atau *adhal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim";
 9. Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon secara tegas menerangkan bahwa yang menikahkan (bertindak sebagai wali) adalah H.M. Yusuf yang bukan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama/wali hakim, maka pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilakukan oleh wali hakim yang berwenang, dengan sendirinya syarat wali dalam pernikahan a quo tidak terpenuhi (tidak sah);
 10. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pernikahan Pemohon I dengan

Pemohon II yang dimohonkan untuk diitsbatkan haruslah ditolak;

11. Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;
12. Mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan *nash-nash syara'* yang berkaitan dengan perkara ini ;"²¹.

Adapun amar penetapannya adalah sebagai berikut:

1. "Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);".

Analitis yuridis terhadap penetapan Pengadilan Agama Sukabumi nomor 0020/Pdt.P/2012/PA.Smi. dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara dalil-dalil dan permohonan dari Para Pemohon dengan alasan-alasan hukum serta diktum penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

1. Dalil-dalil pemohon; (a) pernikahan sudah dilangsungkan pada tanggal 17 Nopember 2009 di wilayah hukum KUA Kecamatan Tanjung Jumlai, (b) wali adalah Penghulu Tanjung Jumlai dengan disaksikan dua orang saksi dan maskawin dibayar tunai, (c) tidak ada halangan pernikahan, (d) setelah menikah Para Pemohon berdomisili di Kota Sukabumi (e) sudah mempunyai anak yang lahir pada tanggal 17 Februari 2011, (f) selama pernikahan tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan yang dimaksud, dan (g) pernikahan Tidak tercatat di KUA Kecamatan Tanjung Jumlai.
2. Permohonan Pemohon; (a) menetapkan sah perkawinan Para Pemohon, dan (b) biaya perkara menurut hukum.
3. Alasan-alasan hukum Majelis Hakim; (a) permohonan Para Pemohon adalah *Itsbat Nikah*, (b) para Pemohon datang sendiri ke *pengadilan* (tidak menggunakan jasa hukum

²¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penetapan Nomor:0020/Pdt.P/2012/PA.Smi.,

Advokat), (c) permohonan Para Pemohon sudah diumumkan selama 14 hari, (d) permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, (e) pokok masalah adalah *itsbat* nikah yang dimohonkan penetapannya oleh Para Pemohon karena sudah melangsungkan pernikahan tetapi tidak tercatat di KUA, (f) pemohon II (istri) beragama Islam, ayah pemohon II beragama kristen, (g) wali nikah adalah H.M. Yusuf, bukan PNS KUA Tanjung Jumalai, bukan juga Kepala KUA Tanjung Jumalai, (h) syahnya perkawinan, haruslah dipenuhi seluruh unsur/rukun perkawinan yang menurut Pasal 14 KHI, rukun perkawinan tersebut adalah Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, dua orang saksi serta Ijab dan Kabul, (i) Para Pemohon beragama Islam dan tidak ada larangan menikah, (j) syarat sebagai seorang wali dijelaskan pada Pasal 20 KHI, harus balig, harus seorang muslim, maka oleh karena orang tua Pemohon II bukanlah seorang muslim, hak perwaliannya beralih kepada wali hakim yakni Kepala Kantor Urusan Agama, (k) menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim Pasal 1 ayat (2) berbunyi: “Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali”, (l) menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim Pasal 2 ayat (1) berbunyi: “Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau *mafqud*, atau berhalangan, atau *adhal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim”, (m) pemohon secara tegas menerangkan bahwa yang bertindak sebagai wali adalah H.M. Yusuf yang bukan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama/wali hakim, maka pernikahan Para Pemohon tidak dilakukan oleh wali hakim yang berwenang, dengan sendirinya syarat wali dalam pernikahan *a quo* tidak terpenuhi (tidak sah), (n) pernikahan yang dimohonkan Para Pemohon untuk di*itsbatkan* haruslah ditolak, (o) biaya perkara dibebankan kepada pemohon, dan (p)

mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan *nash-nash syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

4. Diktum penetapan Majelis Hakim; (a) menolak Permohonan Para Pemohon, dan (b) membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon.
5. Analisis yuridis; (a) permohonan ini adalah bermohonan *itsbat* nikah, (b) wali pernikahan adalah penghulu (H.M. Yusuf), bukan Kepala KUA sebagai wali hakim. Menurut “hukum negara” wali nikah terdiri dari; wali *nasab* dan wali hakim, sedangkan menurut “hukum agama” wali nikah terdiri dari; wali *nasab*, wali hakim, dan wali *muhakkam*.
6. Hasil analisis yuridis; (a) permohonan *itsbat* nikah sesuai dengan hukum yang berlaku, dan (b) wali nikah sesuai dengan hukum Islam, tetapi tidak sesuai dengan hukum negara.
7. Analisis yuridis komprehensif. Menurut pemahaman peneliti urutan penanganan perkara ini adalah sebagai berikut:
 - a. Perkara ini adalah permohonan *itsbat* nikah dengan demikian harus diteliti dan diputuskan terlebih dahulu apakah Para Pemohon dapat mengajukan *itsbat* nikah. Pengaturan tentang *itsbat* nikah menurut Pasal 7 ayat (3) KHI, yaitu; *Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974; Pengaturan tentang *itsbat* nikah menurut Pasal 7 ayat (4) KHI, yaitu; “Yang berhak mengajukan permohonan *itsbat* nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa permohonan *itsbat* nikah Para Pemohon ke Pengadilan Agama Sukabumi tersebut adalah benar menurut

KHI karena *itsbat* nikah tersebut dimohonkan terkait dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan Para Pemohon *itsbat* nikah tersebut merupakan pihak yang berhak mengajukan permohonan *itsbat* nikah karena Para Pemohon adalah suami dan istri.

- b. Karena permohonan Para Pemohon ini merupakan permohonan *itsbat* nikah, maka harus diteliti terlebih dahulu apakah pernikahan sebelumnya yang tidak tercatat tersebut apakah sah atau tidak menurut hukum Islam. Hal tersebut penting diketahui berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Lihat juga Pasal 4 KHI.

Pernikahan yang telah dilakukan oleh para pemohon telah memenuhi rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 KHI yaitu adanya; (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, dan (e) ijab dan kabul. Dengan demikian pernikahan Para Pemohon sah menurut hukum Islam.

karena pernikahan Para Pemohon sah menurut hukum Islam, maka pernikahan Para Pemohon juga sah menurut negara (Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), tetapi tidak dicatatkan dengan demikian tidak memiliki kekuatan hukum (Pasal 6 ayat (2) KHI).

Fungsi pencatatan nikah bukan untuk menyatakan sah tidaknya suatu pernikahan, tetapi “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat” (Pasal 5 ayat (1) KHI), dan agar pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum (Pasal 6 ayat (2) KHI).

- c. Berdasarkan uraian pada nomor 1) dan 2) diatas maka menurut peneliti, penetapan *itsbat* nikah Pengadilan Agama Sukabumi pada perkara tersebut harus didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan

demikian amar penetapannya seharusnya berbunyi; “Menerima permohonan Para Pemohon”.

- d. Menurut analisa peneliti, eksistensi wali *nasab* dan wali hakim sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) KHI dan PMA No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim adalah bagi calon mempelai yang dari awal akan melangsungkan pernikahan sebagaimana peraturan perundang-undangan mengaturnya. Sedangkan bagi calon mempelai yang dari awal akan melangsungkan pernikahan tidak sebagaimana peraturan perundang-undangan mengaturnya, maka yang berlaku bagi calon mempelai tersebut adalah sebagaimana hukum Islam mengaturnya, dengan risiko pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum berdasarkan hukum positif di Indonesia.
- e. Menurut ketentuan yang terdapat di dalam PMA No. 30 Tahun 2005 tersebut, dalam keadaan tertentu, posisi wali hakim (Kepala KUA, Pasal 1 angka 2 PMA No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim) dapat diganti oleh penghulu (Pasal 3 ayat (2) PMA No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim) atau wakil penghulu (Pasal 3 ayat (3) PMA No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim). Di dalam PMA No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim tidak didefinisikan siapa yang dimaksud dengan wakil penghulu tersebut. Apakah wakil penghulu tersebut harus PNS, bukan PNS atau tidak harus PNS. Dalil-dalil Para Pemohon di dalam permohonannya hanya menyebutkan “wali penghulu yang bernama H.M. Yusuf”. Karena Para Pemohon tersebut bukan advokat sehingga “kurang mengerti masalah hukum”, mungkin saja yang dimaksud dengan “penghulu” tersebut sebenarnya adalah “wakil penghulu”. Di dalam dalil-dalil Para Penggugat juga tidak dijelaskan “kondisi” tempat dilaksanakannya perkawinan yang dimaksud. Hal ini sangat penting karena apabila tempat dilaksanakannya pernikahan tersebut termasuk kedalam kategori “daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi”, maka wali nikah tersebut dapat

dilaksanakan oleh wali hakim wakil penghulu sebagai pengganti Kepala KUA.

- f. Sekiranya permohonan Para Pemohon tersebut dibuat dan diproses di Pengadilan Agama dengan menggunakan jasa hukum Advokat, sangat dimungkinkan hasil akhirnya (amar putusannya) akan berbeda.

Bahwa amar penetapan perkara Nomor: 0020/Pdt.P/2012/PA.Smi di Pengadilan Agama Sukabumi pada pokoknya adalah; “Menolak permohonan Para Pemohon”. Bagi Para Pemohon tentunya amar penetapan ini tidak sebagaimana yang diharapkan, sehingga “masalah” yang ingin dihilangkan atau diatasi dengan adanya penetapan tersebut menjadi tetap ada, untuk itu diperlukan jalan keluarnya. Pada dasarnya terhadap masalah tersebut ada dua jalan keluar yang dapat ditempuh oleh Para Pemohon tersebut, meskipun keduanya sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jalan keluar yang pertama adalah melakukan pernikahan ulang, dan jalan keluar yang kedua adalah melakukan upaya hukum.

Melakukan pernikahan ulang sebagaimana peraturan perundang-undangan mengaturnya mungkin cara yang paling cepat dan paling murah untuk menyelesaikan masalah *itsbat* nikah ini, tetapi masalahnya menjadi tidak sederhana karena di dalam pernikahannya, Para Pemohon sudah dikaruniai oleh seorang anak. Permasalahan yang mungkin timbul adalah; bagaimana kedudukan hukum anak tersebut apabila pernikahan kembali dilakukan pada tahun 2012 sementara anak lahir pada tahun 2011? Terkait dengan hubungan keperdataan antara anak dengan orang tuanya tersebut dapat dipastikan harus melalui mekanisme penetapan dari pengadilan.

Bagi orang tua yang beragama Islam, penetapan pengadilan terkait dengan pengakuan anak tersebut harus dimintakan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya mencakup domisili orang tua tersebut. Hal itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Adapun kewenangan Pengadilan Agama tersebut diatur sebagaimana ketentuan Pasal 49

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara menentukan bahwa:

“Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”.

Terkait dengan hal tersebut, menurut M. Yahya Harahap:

“...apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *nebis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya”²².

Kemudian dikatakan juga bahwa:

“Tidak demikian halnya dengan penetapan. Pada dirinya hanya melekat kekuatan pengikat secara sepihak, yaitu pada diri pemohon, jadi tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian pada pihak mana pun. Oleh karena itu, pada penetapan tidak melekat *nebis in idem*. Setiap orang yang merasa dirugikan oleh penetapan itu, dapat mengajukan gugatan atau perlawanan terhadapnya”²³.

Berdasarkan pendapat tersebut, apabila terhadap penetapan pengadilan atas perkara Nomor: 0020/Pdt.P/2012/PA.Smi. di pengadilan Agama Sukabumi tersebut mempunyai kedudukan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka Para Pemohon yang merasa dirugikan oleh penetapan pengadilan tersebut (karena permohonannya

²² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 43.

²³ *Op.cit.*, hlm. 44.

ditolak) dapat melakukan gugatan atau perlawanan terhadap penetapan pengadilan tersebut. Yang dimaksud dengan gugatan disini tentunya termasuk juga gugatan *voluntair* (permohonan penetapan). Sedangkan yang dimaksud dengan perlawanan adalah upaya hukum lainnya.

Yang dimaksud dengan upaya hukum lainnya tersebut dapat berupa:

- a. Mengajukan permintaan pembatalan penetapan pengadilan yang dimaksud kepada Mahkamah Agung. Terkait dengan upaya tersebut dapat menggunakan preseden²⁴ Penetapan Mahkamah Agung Nomor 5 Pen/Sep/1975.
- b. Mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung terhadap penetapan pengadilan yang dimaksud. Pada dasarnya upaya Peninjauan Kembali ini ditempuh untuk melakukan koreksi atau memperbaiki kekeliruan dari penetapan pengadilan tersebut. Sebagai preseden pengajuan PK ke Mahkamah Agung terkait dengan penetapan pengadilan tersebut dapat mempergunakan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1 PK/Ag/1990.

Apabila penetapan pengadilan yang dimaksud belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena belum melampaui batas waktu 14 hari, maka upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Para Pemohon adalah Kasasi ke Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, yaitu; "Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh undang-undang". Yang dimaksud dengan "kecuali ditentukan lain oleh undang-undang" dapat kita jumpai penjelasannya pada penjelasan pasal 43 ayat (1) tersebut, yaitu; "Pengecualian dalam ayat (1) pasal ini diadakan karena adanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang oleh undang-undang tidak dapat dimohonkan banding".

Sebagaimana kita ketahui bahwa terhadap putusan penetapan pengadilan, menurut doktrin dan praktik pengadilan saat ini, "penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan atau *voluntair*, pada umumnya merupakan putusan yang bersifat tingkat pertama dan terakhir"²⁵. Dengan demikian terhadap penetapan pengadilan perkara nomor: 0020/Pdt.P/2012/PA.Smi. di pengadilan Agama Sukabumi tidak dapat dilakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi, tetapi kasasi ke Mahkamah Agung.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Wali pernikahan menurut agama hukum Islam pada pokoknya terdiri dari; (a) wali *nasab*, (b) wali hakim, dan (c) wali *muhakkam*. Sedangkan di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, wali pernikahan terdiri dari; (a) wali *nasab*, dan (b) wali hakim saja. Dengan demikian wali *muhakkam* yang diakui eksistensinya di dalam hukum Islam, pada kenyataannya tidak ada pengaturannya di dalam peraturan perundang-undangan pernikahan di Indonesia, (2) Tindakan hukum yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri yang tidak diakui pernikahannya tersebut diantaranya adalah: a) Melakukan pernikahan ulang sebagaimana hukum mengaturnya. Kemudian apabila ternyata pasangan suami istri tersebut sudah mempunyai anak, maka terhadap anak tersebut dilakukan pengangkatan/pengesahan anak melalui penetapan Pengadilan Agama, b) Apabila penetapan Pengadilan Agama yang menolak permohonan *itsbat* nikah Para Pemohon tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Para Pemohon dapat mengupayakan kasasi ke Mahkamah Agung, c) Apabila penetapan Pengadilan Agama yang menolak permohonan *itsbat* nikah Para Pemohon tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Para Pemohon dapat mengajukan pembatalan penetapan pengadilan kepada Mahkamah Agung atau melakukan Peninjauan Kembali penetapan pengadilan yang dimaksud ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, maka peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai

²⁴ "Hal yang telah terjadi lebih dahulu dan dapat dipakai sebagai contoh". Lihat: Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, *Preseden*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/preseden>, diunduh hari Selasa tanggal 29 Mei 2018.

²⁵ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 43.

berikut: (1) Melakukan revisi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim dengan memasukan wali *muhakkam* sebagai salah satu wali nikah yang diakui eksistensinya di dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pernikahan di Indonesia, (2) Melakukan formalisasi fungsi dan tugas wali *muhakkam* untuk memfasilitasi tradisi pernikahan masyarakat sebagai salah satu bentuk dari kearifan lokal yang berpotensi dapat mengurangi beban tugas Pengadilan Agama terkait dengan penetapan wali hakim, (3) Melakukan pembinaan dan standarisasi wali *muhakkam* agar fungsi dan tugasnya dapat selaras dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan pernikahan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran

Buku-Buku

- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Era Intermedia, Solo, 2010.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan Cetakan Ketiga*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2009.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Hasballah Thaib, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*, Universitas Al Azhar, Medan, 2010.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Monograf Filsafat Ilmu, Metode Penelitian Hukum Dan Menggunakan Teori/Konsep Di Bidang Ilmu Hukum*, Bandung, 2013.
- Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2017.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Salim HS., dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang *Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.

Sumber Dari Internet

- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.
- Wikipedia, *Metode Deduksi*, Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Metode_deduksi, diunduh hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018.